

NAMAAR FACHRUDDIN Dijadikan Nama RS UMS



Prof Haedar Nashir menggunting untaian bunga.

SOLO (KR) - Nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah AR Fachruddin diabdikan menjadi nama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Rumah sakit baru berlantai lima ini berada di Jalan Adisucipto.

RS AR Fachruddin diresmikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir MSi disaksikan mantan wakil Presiden RI Dr (HC) Jusuf Kalla dan Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif MSi usai memperingati Hari Jadi ke-66 UMS di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kamis (24/10).

RS AR Fachruddin didesain ramah lingkungan terdiri Blok A, Blok B, dan Blok Utilitas. Sementara ini masih Tipe C menyediakan ruang rawat inap berkapasitas sekitar 150 tempat tidur. Menandai peresmian Prof Haedar Nashir menggunting untaian bunga. "Kita akan menggantung bunga untuk meresmikan rumah sakit AR Fachruddin UMS, iujarnya. Selain peresmian rumah sakit juga dilakukan ground breaking perluasan dan pengembangan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS.

Badan Pembina Harian UMS, Drs Dahlan Rais MHum berharap perluasan Gedung FEB menjadi gedung yang kokoh, megah, dan nyaman untuk pembelajaran. (Qom)-d

DISKOMINFO KARANGANYAR Pembangunan Gedung Batal

KARANGANYAR (KR) - Pembangunan Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karanganyar pada tahun 2025 dipastikan batal. Tak ada alokasi anggaran dari keuangan daerah untuk kebutuhan itu.

Kepala Diskominfo Karanganyar Isnan Nur Azis mengatakan usulan pembangunan kantornya belum dapat direalisasikan di tahun anggaran 2025. Padahal detail engineering design (DED) pembangunan sudah disusun konsultan. DED itu dimenangkan konsultan asal Semarang dengan nilai Rp100 juta yang dibiayai APBD 2024.

"Sampai hari ini belum ada yang akan dialokasikan untuk pembangunan Gedung Diskominfo di rencana anggaran 2025. Sepertinya memang tidak akan dipasang. Ada hal urgen lainnya yang harus dibiayai APBD," ungkapnya, Jumat (25/10). Dalam DED itu, proyek pembangunan gedung Diskominfo diperkirakan Rp 5 miliar. Gedung Diskominfo yang selama ini magersari di Kantor Bupati Karanganyar akan dipindah ke kompleks perkantoran Cangkang, tepatnya di sisi utara Kantor Pajak Pratama Karanganyar.

Isnan juga pesimis anggaran pembangunan dipasangi di APBD perubahan 2025. Sebab, waktu yang tersisa di anggaran perubahan tidak cukup untuk mengerjakan proyek fisik. "Efektif di perubahan hanya dua bulan. Tidaklah cukup membuat gedung," jelas Isnan.

Ia mengatakan kantor lama di kompleks Setda masih bisa mengakomodir kegiatan rutin dinasnyanya. Di gedung B yang menaungi kantor dinasnyanya terdapat sejumlah OPD. Diskominfo memakai beberapa ruang untuk dua bidang dan satu sekretariat.

Nantinya saat gedung Diskominfo selesai dibangun, ia akan menambah satu bidang lagi, yakni statistik. "Aktivitas statistik masih di Bagian IKP. Padahal aktivitas dan penguasannya cukup banyak. Akan dibuat satu bidang lagi statistik agar teman-teman lebih fokus," katanya.

Sebelumnya, DED pembangunan gedung juga disusun sekretariat DPRD Karanganyar terkait persiapan pembangunan gedung wakil rakyat. Realisasinya dipastikan juga tidak di tahun anggaran 2025. (Lim)-d

BANTUAN IURAN BPJS Dukung Germas Rp 20,9 M



Evaluasi Germas 2023 di Purbalingga.

PURBALINGGA (KR) - "Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Purbalingga menyerap sedikitnya Rp 20.855.998.800 untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dialokasikan oleh Pemkab Purbalingga. Walhasil, hampir seluruh penduduk Purbalingga telah terlindungi BPJS." Baik sebagai penerima bantuan iuran, peserta mandiri maupun peserta yang dibiayai oleh instansi tempat mereka bekerja," tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga, Suroto, di sela acara evaluasi implementasi Germas tahun 2023 di Aula Convention PM Collaboration, Kamis siang (24/10).

Suroto yang menjadi narasumber dalam acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan itu menyebutkan, sasaran utama bidang kesehatan menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Purbalingga. "Sayangnya masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Germas selama tahun 2023. Belum semua indikator germas dilaksanakan oleh OPD dan lintas sektor," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan yang mendukung Germas belum sepenuhnya diimplementasikan. Forum Komunikasi (Forkom) Germas yang telah terbentuk belum menjalankan tugasnya secara optimal. "Pemahaman masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung germas masih kurang," tandas Suroto. (Rus)-d

DEBAT PUBLIK PILKADA KLATEN 2024

Jumlah Pendukung Dibatasi 40 Orang

KLATEN (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten akan menggelar debat publik putaran pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati, Minggu (27/10/2024), pukul 19.00 WIB. Ketua KPU Klaten Primus Supriono mengemukakan, terdapat lima panelis yang menyiapkan tema, subtema dan soal-soal. "Moderator yang akan memandu jalannya debat, dari TVRI. Untuk panelis, belum kita sampaikan ya. Ini termasuk bagian yang belum kita sampaikan," kata Primus.



KR-Sri Warsti

Primus Supriono

okratik RPJPD Kabupaten Klaten. Selain itu, diperkaya dengan hasil pelaksanaan forum group discussion (FGD) yang dihadiri berbagai lapisan masyarakat. Antara lain dari tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, pemerintahan dan juga dari penyandang disabilitas.

"Lewat FGD, kita menyerap aspirasi masyarakat. Kita juga akan melakukan pengambilan video tentang aspirasi atau harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang akan datang. Mereka yang selama ini tidak terdengar dan tidak berani bicara, melalui forum ini mereka kita beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat melalui video yang kita ambil dari mereka," jelas Primus.

Menurut Primus Supriono, tema untuk debat pertama adalah, Menghayati Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Cerdas. Lebih mengarah pada fungsi good governance, keterbukaan informasi publik, layanan publik, sema-

ngat kebangsaan dan lain-lain. "Sifatnya masih umum, nabati yang tema debat kedua lebih fokus. Mungkin pariwisata, ekonomi, pendidikan dan lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, debat publik merupakan salah satu bagian dari kampanye. Sedangkan kampanye dimaksudkan sebagai sarana untuk pendidikan politik bagi pemilih. "Debat lebih pada pemberitahuan informasi pada masyarakat tentang profil visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dengan demikian masyarakat kita diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menuntun pada pilihan politiknya," papar Primus. (Sit)-d

NASIB BURUH HARUS DIBUKA SECARA TRANSPARAN

Manajemen PT Sritex Mangakui Pailit

SUKOHARJO (KR) - PT Sritex mengakui pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Pengakuan tersebut disampaikan sekarang resmi PT Sritex saat klarifikasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo.

Klarifikasi digelar di Gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo, Jumat (25/10). Klarifikasi dihadiri manajemen PT Sritex, Disperinaker Sukoharjo dan pihak terkait lainnya.

General Manajer (GM) HRD PT Sritex Grup, Hario Ngadiyono mengatakan, putusan PN Niaga Sadang terkait PT Sritex pailit adalah benar adanya. Putusan pengadilan tersebut tertanggal 20 Oktober 2024.

Dalam putusan PN Niaga Semarang dijelaskan bahwa ada empat perusahaan yang tergabung dalam SRIL di antaranya PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, PT Primayudha Mandirijaya di Kabupaten Boyolali, PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, dan PT Bitratex Industries di Semarang. Keempat perusahaan tersebut dinyatakan pailit sesuai hasil putusan Pengadilan Niaga



KR-Wahyu Imam Ibadid

Manajemen PT Sritex saat memberikan klarifikasi terkait pailit kepada Disperinaker Sukoharjo.

Semarang. "Putusan PN Niaga Semarang terkait PT Sritex pailit benar adanya. Tapi sampai sekarang PT Sritex masih berjalan secara normal," ungkap Hario. Meskipun demikian, sampai saat ini produksi di PT Sritex masih berjalan. Para buruh atau pekerja juga tetap masih bekerja seperti biasa.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno, mengatakan, Disperinaker Sukoharjo sudah meminta klarifikasi dengan bertemu langsung pihak manajemen PT

Sritex. Dalam kesempatan tersebut PT Sritex mengakui hasil putusan PN Niaga Semarang. "Sesuai keterangan PT Sritex memang benar putusan PN Niaga Semarang yang menyatakan pailit," ujarnya.

Sementara itu, Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo meminta kejelasan status buruh PT Sritex dan pihak manajemen diminta transparan memberikan informasi termasuk hak buruh setelah muncul kabar putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang yang menyatakan PT Sritex pailit. Ketua Forum

Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Jumat (25/10) mengatakan, PT Sritex dalam hal ini harus secepatnya memberikan kejelasan status perusahaan dan nasib buruh.

"Hal ini penting setelah muncul kabar putusan PN Niaga Semarang yang menyatakan PT Sritex pailit. Pertama harus diklarifikasi, secepatnya manajemen memberi kejelasan status perusahaan apakah benar pailit sesuai putusan PN Niaga Semarang atau tidak. Kedua, kejelasan nasib buruh atau karyawan mereka. Sebab keduanya saling terkait dan butuh kejelasan secepatnya," tandas Sukarno.

Menurutnya, FPB Sukoharjo sudah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja PT Sritex. Hal ini terkait dengan kabar PT Sritex pailit. Kejelasan status secepatnya harus diketahui oleh semua pihak. "Apabila benar PT Sritex pailit maka bagaimana nasib perusahaannya. Termasuk nasib buruh apakah tetap bekerja di sana atau bagaimana," lanjutnya. (Mam)-d

PENIPUAN DI BANYUMAS

Catut Nama Pj Bupati dan Istri

BANYUMAS (KR) - Aksi penipuan dengan modus bantuan hibah untuk rumah ibadah yang mencatut nama Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, dan istrinya, Dewi Wikaningsih, beredar di aplikasi WhatsApp. Penipu menggunakan foto pasangan Pj bupati bersama istri sebagai profil di aplikasi WhatsApp, dengan nomor yang terdaftar sebagai 0821-4217-0476, menghubungi warga serta pengurus masjid untuk menawarkan bantuan fiktif. Dalam aksinya, pelaku memperkenalkan diri sebagai Pj Bupati Banyumas, kemudian menawarkan bantuan hibah untuk rumah ibadah. Namun, penipu tersebut terlebih dahulu meminta foto buku rekening sebagai syarat pencairan dana. Modus penipuan ini mengatasnamakan bantuan dari peme-

rintah. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas, Wahyono, Rabu (24/10), mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya pada pesan-pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Wahyono menjelaskan bahwa proses penyaluran hibah dan bantuan sosial memiliki prosedur yang jelas dan tidak dilakukan secara langsung oleh Bupati kepada masyarakat. "Penyaluran hibah dan bantuan sosial memiliki mekanisme resmi melalui jalur pemerintahan, bukan lewat pesan WhatsApp atau komunikasi langsung dari Bupati. Jika ada yang mengatasnamakan Pj Bupati Banyumas dalam hal seperti ini, sudah pasti itu adalah penipuan," tegas Wahyono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menerima pesan serupa agar tidak ada korban yang terjerat. "Jangan berikan data pribadi atau informasi rekening kepada pihak yang tidak dikenal," tandasnya.

Menurut Wahyono, Pemkab Banyumas juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. "Penipuan semacam ini sering kali memanfaatkan keluguan masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit," jelasnya.

Untuk itu, Wahyono mengingatkan kembali pentingnya kewaspadaan dan konfirmasi melalui jalur resmi jika ada tawaran bantuan yang meragukan. Masyarakat diimbau tetap Waspada. Kasus penipuan dengan memalsukan

identitas pejabat ini bukan kali pertama terjadi. Modus yang dilakukan penipu kerap berubah-ubah untuk menyesuaikan kondisi. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak mudah terpedaya dengan janji-janji manis yang datang dari nomor tak dikenal.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk terus berkomunikasi dengan pihak berwenang jika ada hal mencurigakan terkait tawaran bantuan atau informasi lain yang dirasa tidak masuk akal. Kejahatan siber seperti ini dapat dicegah dengan edukasi yang lebih luas dan sikap kritis dari setiap individu. Diharapkan dengan adanya imbauan ini, penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah seperti Pj Bupati Banyumas dapat segera diatasi, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban. (Dri)-d

TERKAIT PENGISIAN PERDES

Pemkab Pati Kebanjiran Surat Aduan

PATI (KR) - Puluhan mahasiswa dari organisasi GMNI, HMI, dan IPNU Pati menggelar aksi demo di depan kantor bupati Pati, Jumat (25/10). Mereka meminta agar Pemkab menunda pengisian perangkat desa 2024, karena dianggap bisa menguntungkan salah satu peserta pilkada.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pati mengeluarkan izin pengisian perangkat desa tahun 2024 di 125 desa (17 kecamatan), yang akan mengisi 264 formasi jabatan perangkat desa. Mereka akan mengisi lowongan 42 sekretaris desa serta 222 formasi kepala seksi dan kepala dusun. Sementara itu, Persaudaraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Pati, tidak terlibat dalam proses pengisian perangkat desa 2024. Karena ditangani panitia desa penyelenggara. Sehingga, organisasi Pasopati, baik struktural maupun fungsional tidak terlibat. Demikian ditegaskan Ketua Pasopati, Pandoyo. Berdasar laporan yang diterima,

katanya, ternyata tidak semua desa menyelenggarakan penjurangan perdes. Yaitu di kecamatan Gunungwungkal, Cluwaj, Batangan, Jaken dan Gembong.

Sedangkan desa yang menyelenggarakan penjurangan, tambah Pandoyo, sudah melakukan kesepakatan (MoU) dengan Lembaga Kajian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia. Bahkan LKPP UI yang akan menggelar tes tertulis perdes.

"Adanya info mengenai pengeluaran dari keluarga peserta penjurangan perdes yang sampai ratusan juta rupiah, kami tidak tahu hal tersebut. Semangat Pasopati hanya memperjuangkan pemdes agar mendapat izin dari Pemkab untuk mengisi perdes," ungkap Pandoyo.

Proses pengisian perangkat desa 2024 di Pati Jateng, terus mendapat sorotan dari banyak kalangan. Selain memunculkan aroma tak sedap masalah aliran dana 'bina lingkungan' juga menyebabkan Pemkab Pati kebanjiran surat adu-

an. Menurut sumber wartawan, Pj Bupati Pati setiap hari sedikitnya menerima empat surat aduan masalah pengisian perangkat desa.

Pengirim surat, ada dari LSM, tokoh masyarakat, bahkan ada juga yang ditulis dari keluarga peserta calon perdes. Namun Pemkab Pati tidak bisa intervensi, karena penyelenggara penjurangan perdes adalah panitia di masing-masing pemdes. Selain ditujukan ke Pj bupati Pati, tambah sumber wartawan yang enggan disebutkan identitasnya tersebut, menambahkan, surat aduan juga dikirim ke KPK, Polda Jateng dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Pati.

Terpisah, Direktur LBH Joeang Fatkhurochman SH MH mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima informasi mengenai aliran dana bina lingkungan yang diumumkan oknum tertentu dalam proses pengisian perdes 2024 di Pati. "Ada yang mau kirim Rp 400 juta dan ada juga Rp 900 juta. Maka kami

akan segera mengirim surat pengaduan resmi ke Polda Jateng," tuturnya.

Fatkhurochman juga mendapat informasi, jika calon jadi (unggulan), nantinya akan mendapat kode khusus dalam menulis di lembar kertas jawaban (LKJ). Sebelumnya, Fatkhurochman mensinyalir jumlah dana untuk skenario bina lingkungan ditaksir mencapai Rp 79 miliar. Dana tersebut berasal dari pihak tertentu yang ingin keluarganya menjadi perdes. "Diduga, dana iuran untuk jabatan kadus dan kasi berkisar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Untuk jabatan sekdes, bisa tembus Rp 1 miliar," tambah anggota LBH Joeang, Supriyanto.

Ketua LPRNI Pati, Masud berharap agar pemdes tetap bersinergi dan meminta petunjuk ke Pemkab. "Meskipun pelaksanaan pengisian perdes adalah pemdes, namun tidak ada salahnya kalau panpel koordinasi dengan Pemkab. Karena secara hirarki, pemdes dibawah Pemkab" tegasnya. (Cuk)-d